



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS  
KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN  
SULAWESI, JAWA, BALI DAN MALUKU**

SKRIPSI  
Shadrina Atikah Rahmah  
1602015204

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS  
KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN  
SULAWESI, JAWA, BALI DAN MALUKU**

SKRIPSI

Shadrina Atikah Rahmah

1602015204

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN SULAWESI JAWA BALI DAN MALUKU”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Pro. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari hasil penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

  
METERAI TEMPEL  
E A79AJX89861042

(Shadrina Atikah Rahmah)

NIM. 1602015204

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH,  
EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS PELAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN  
SULAWESI JAWA BALI DAN MALUKU

**NAMA** : SHADRINA ATIKAH RAHMAH

**N I M** : 1602015204

**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

**TAHUN AKADEMIK** : 2020/2021

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si.	
Pembimbing II	Daram Heriansyah, SE., M.Si.	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E, M.Si.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul:


**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH  
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI PADA PULAU  
KALIMANTAN, SULAWESI, JAWA, BALI DAN MALUKU**

Yang disusun oleh:  
Shadrina Atikah Rahmah  
1602015204

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu (S1)  
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA  
Pada tanggal : 19 Desember 2020

### Tim Penguji:

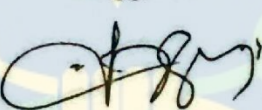
Ketua, merangkap anggota :

  
(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

  
(Dr. Nuzulul Hidayati, S.E., M.M., Ak., CA.)

Anggota :

  
(Fitrisia, S.E., Ak., M.Si. CA.)

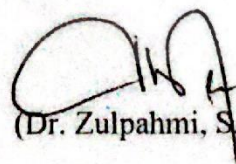
### Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



(Sumardi, S.E, M.Si.)



(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

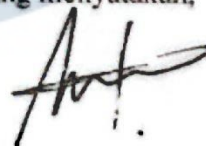
Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shadrina Atikah Rahmah  
NIM : 1602015204  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN SULAWESI JAWA BALI DAN MALUKU”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Oktober 2020  
Yang menyatakan,



(Shadrina Atikah Rahmah)  
NIM. 1602015204

## ABSTRAKSI

Shadrina Atikah Rahmah (1602015204)

### **PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH, EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PADA PULAU KALIMANTAN SULAWESI JAWA BALI DAN MALUKU.**

*Skripsi. Program Studi Akuntansi Strata Satu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.*

*Kata Kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Variabel dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah ( $X_1$ ), efektivitas keuangan daerah ( $X_2$ ), kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ( $X_3$ ), dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah ( $Y$ ). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang telah diberi skor EKPPD oleh Kemendagri selama periode 2015-2017 dan yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *judgment sampling* dan diperoleh 18 provinsi sebagai sampel. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian daerah ( $X_1$ ) dan efektivitas keuangan daerah ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah ( $Y$ ), sedangkan untuk kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ( $X_3$ ) tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya secara bersama-sama ketiga variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

## ABSTRACT

**Shadrina Atikah Rahmah (1602015204)**

**THE THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE, REGIONAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND PERFORMANCE OF REGIONAL GOVERNMENTS ON THE ACCOUNTABILITY OF PROVINCIAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING IN KALIMANTAN, SULAWESI, JAVA, BALI AND MALUKU ISLAND.**

*The Thesis of Bachelor Degree Program, Accounting Major, Economical and Business Faculty of Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA, 2020, Jakarta.*

*Keywords: Regional Financial Independence, Regional Financial Effectiveness, Regional Government Performance, Regional Financial Reporting Accountability.*

This study aims to determine how the influence of regional financial independence, the effectiveness of regional finance, and the performance of local government administration on the accountability of regional financial reporting.

The variables in this study are regional financial independence (X1), regional financial effectiveness (X2), local government performance (X3), and regional financial reporting accountability (Y). The population in this study are local governments that have been given an EKPPD score by the Ministry of Home Affairs during the 2015-2017 period and whose financial reports have been audited by the BPK. The sampling technique used was judgment sampling and 18 provinces were obtained as samples. The type of data used in this research is secondary data. The research method used is logistic regression analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that regional independence (X1) and regional financial effectiveness (X2) affect the accountability of regional financial reporting (Y), while the performance of regional government administrators (X3) has no effect. Furthermore, these three variables together have a significant influence on the accountability of regional financial reporting.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam tidak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, dan para pengikut beliau sampai akhir zaman. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyusun skripsi hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Tak pula peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta keluarga tercinta yang selalu memberikan bantuan moral maupun materil serta semangat dan do'a yang selalu dicurahkan selama peneliti melakukan penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada::

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Strata I Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini selama masa pandemi *covid 19*.


8. Bapak Daram Heriansyah, SE., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini selama masa pandemi *covid 19*.
9. Seluruh dosen pengajar di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan disiplin ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Untuk Prameysi Anggi, Cahyo Prasetyo, Dwi Andini, Fadli, Adisty Ammarwati, dan Bayty Asih yang selalu memberikan waktu luang, semangat, motivasi, dan canda tawa serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal soleh yang senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT dan diberikan balasan berlipat ganda.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang peneliti tidak mengetahui, oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk tercapainya penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Jakarta, 30 Oktober 2020  
Peneliti

  
(Shadrina Atikah Rahmah)  
NIM. 1602015082

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSR TAKSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	6
1.2.3 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Telaah Pustaka .....	36
2.2.1 Akuntansi Sektor Publik .....	36
2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintah .....	37
2.2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah .....	37
2.2.2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah .....	37
2.2.3 Desentralisasi .....	40
2.2.3.1 Pengertian Desentralisasi .....	40
2.2.3.2 Kemandirian Keuangan Daerah .....	40

2.2.3.3 Efektivitas .....	42
2.2.4 Kinerja .....	43
2.2.4.1 Pengertian Kinerja .....	43
2.2.4.2 Kinerja Pemerintah Daerah .....	44
2.2.4.3 Jenis – jenis Opini Kinerja Pemerintah Daerah .....	44
2.2.5 Akuntabilitas .....	46
2.2.6 Jenis-jenis Laporan Keuangan Daerah .....	47
2.2.6.1 Laporan Realisasi Anggaran .....	48
2.2.6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih .....	49
2.2.6.3 Neraca .....	50
2.2.6.4 Laporan Operasional .....	51
2.2.6.5 Laporan Arus Kas .....	52
2.2.6.6 Laporan Perubahan Ekuitas .....	54
2.2.6.7 Catatan Atas Laporan Keuangan .....	54
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	55
2.4 Rumusan Hipotesis .....	57
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	58
3.2 Operasionalisasi Variabel .....	58
3.3 Populasi dan Sampel .....	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.4.1 Tempat dan Waktu Penelitian .....	62
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	62
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	62
3.5.1 Analisis Akuntansi .....	62
3.5.2 Analisis Deskriptif .....	62
3.5.3 Analisis Regresi Logistik .....	63
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	66
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi di Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku .....	66

4.1.2	<i>Gambaran Umum Sampel Penelitian</i> .....	66
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Interpretasi .....	70
4.2.1	<i>Analisis Akuntansi</i> .....	70
4.2.1.1	<i>Kemandirian Keuangan Daerah</i> .....	71
4.2.1.2	<i>Efektivitas Keuangan Daerah</i> .....	76
4.2.1.3	<i>Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i> .....	81
4.2.1.4	<i>Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah</i> .....	84
4.2.2	<i>Analisis Statistik</i> .....	87
4.2.2.1	<i>Analisis Deskriptif</i> .....	87
4.2.2.2	<i>Analisis Regresi Logistik</i> .....	88
4.3	Pembahasan .....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan .....	96
5.2	Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	20
2.	Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah .....	41
3.	Skala Interval Efektivitas .....	43
4.	Operasi Variabel Penelitian .....	59
5.	Pemilihan Sampel Penelitian .....	61
6.	Kemandirian Keuangan Daerah .....	71
7.	Efektivitas Keuangan Daerah .....	76
8.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	82
9.	Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	85
10.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	87
11.	Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik .....	89
12.	Nilai $-2LL$ Likelihood (Block Number) .....	90
13.	Koefisien Determinasi .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2015 .....	1/21
2.	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2016 .....	2/21
3.	Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2017 .....	3/21
4.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Banten 2015 .....	4/21
5.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Banten 2016 .....	5/21
6.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Banten 2017 .....	6/21
7.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur 2015 .....	7/21
8.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur 2016 .....	8/21
9.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur 2017 .....	9/21
10.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku 2015 .....	10/21
11.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku 2016 .....	12/21
12.	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Maluku 2017 .....	14/21
13.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi .....	15/21
14.	Formulir Persetujuan Judul Proposal Skripsi .....	16/21
15.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi .....	17/21
16.	Surat Tugas .....	18/21
17.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I .....	19/21
18.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II .....	20/21
19.	Daftar Riwayat Hidup .....	21/21

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan suatu negara merupakan tanggung jawab pemerintah dengan harapan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat kecurangan dan penyalahgunaan dana pemerintah untuk keuntungan dan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa dan wewenang dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada publik. Penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab tersebut memberikan dampak buruk pada kondisi keuangan pemerintah. Selain berdampak pada kondisi keuangan pemerintah, kondisi tersebut juga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam melayani kepentingan masyarakat sehingga kinerja pelayanan pemerintah menjadi tidak stabil.

Untuk mengurangi terjadi kecurangan dan penyalahgunaan dana tersebut pemerintah pusat membuat suatu kebijakan, yaitu memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan mereka secara efektif agar tercapai pemerataan disetiap daerah. Selain itu dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah pusat berharap seluruh kegiatan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggung jawaban yang dapat menjelaskan aktivitas atau penggunaan dana publik. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk pemeriksaan dan evaluasi



terhadap pemerintah daerah oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik (Matilde, 2020)

Berdasarkan teori keagenan konflik kepentingan berkaitan erat dengan isu mengenai pemenuhan informasi dan asimetri informasi, dimana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi dan menempatkan pihak lain dalam kondisi kekurangan informasi. Untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan atau asimetri informasi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak ketiga yang independen mengaudit laporan keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian kepada pemerintah daerah terkait penerapan akuntabilitas keuangan secara keseluruhan melalui penilaian kewajaran informasi. Oleh karena itu BPK memberikan opini audit sebagai penilaian atas akuntabilitas laporan keuangan (Afriyanti, 2015).

Semakin baik opini yang diterima pemda, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pelaporan keuangannya. Peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemda sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella (2014), Mudhofar (2016), Erryana (2016) yang menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan yang berarti jika tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi maka akuntabilitas pelaporan keuangan daerah tersebut akan meningkat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham (2020), Ni Ketut

(2018) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Pencapaian keberhasilan pemerintah dalam upaya penerapan otonomi daerah untuk menciptakan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah didukung oleh kinerja penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan secara tertib dan dengan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan daerah akan meningkat apabila kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga meningkat, yang berarti kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, sedangkan dalam penelitian Heppy (2017) kinerja keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pencapaian keberhasilan pemerintah dalam upaya penerapan otonomi daerah untuk menciptakan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah juga didukung oleh efektivitas realisasi pendapatan asli daerah yang memproyeksikan efektivitas keuangan daerah. Efektivitas realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen dari desentralisasi fiskal. PAD dapat menjadi gambaran sejauh mana kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan mereka termasuk aset dan memaksimalkan sumber tersebut untuk memobilisasi kegiatan pemerintahan. Erryana (2016) menyatakan bahwa efektivitas keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Ilham (2016), Mudhofar (2016) efektivitas

keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS) tahun 2017 dari 34 provinsi yang terdapat beberapa provinsi yang memiliki penurunan opini audit. Seperti Pada Provinsi Aceh, Provinsi Jambi dan Provinsi Maluku Utara yang pada tahun 2017 mengalami penurunan opini dari WTP menjadi WDP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerjanya pemerintah daerah tidak hanya berfokus untuk pencapaian efektivitas keuangan daerah yang diproyeksikan dengan realisasi pendapatan dan target pendapatan, tetapi juga memperhatikan pengelolaan aset sebagai sumber daya untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pemda untuk mencapai tujuan sebagai daerah otonom.

Adapun objek penelitian ini adalah Provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku. Provinsi di Pulau Kalimantan Terdiri dari 4 Provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Provinsi di Pulau Sulawesi Terdiri dari 5 Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Provinsi di Pulau Jawa Terdiri dari 6 Provinsi yaitu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten. Provinsi di Pulau Maluku ada sebanyak 2 yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara selain itu juga ada Provinsi Bali di Kepulauan Nusa Tenggara.

Berdasarkan fenomena serta permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan Pemda di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimanta, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?
2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?
3. Bagaimanakah pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?
4. Bagaimanakah pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup dari masalah yang akan dibahas yaitu Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku yang dilihat dari data skor oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta laporan keuangan pemerintah provinsi yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2015-2017.

### ***1.2.3 Perumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah Pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku.?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?
3. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?
4. Untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta memperluas pemahaman mengenai Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Manfaat Akademik

Dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali dan Maluku.

### 3. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi untuk pemerintah dan instansi yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan Kemandirian Daerah, Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### 4. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang dipelajari saat perkuliahan dengan melakukan penelitian secara langsung di bidang akuntansi mengenai akuntansi pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pedapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia. *Kinerja* (Vol. 20 No. 1).
- Apriliani, N. K. A., Edy Sujana, S. E., Yuniarta, G. A., & AK, S. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Aziz, A. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1).
- Baskaran, T. and L.P. Feld (2013), Fiscal Decentralization and Economic Growth in the OECD Countries: Is There a Relationship?, *Public Finance Review* 41, 421 – 445.
- Erryana, V., & Setyawan, H. (2016). Determinan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah se-Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 5(1), 1-14.
- Fontanella, A., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok*.
- Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. In *Conference In Business, Accounting, And Management (CBAM)* (Vol. 2, No. 1, pp. 82-90).
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.



- Kurniawati, M., & Hesti, M. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember). *Artikel Ilmiah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.*
- Lewier, C. N., & Kurniawan, C. H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Journal of Accounting and Investment, 17(2), 176-185.*
- Muryawan, S. M., & Sukarsa, M. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Dan Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 229-252.*
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 7(1), 27-34.*
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 102-108.*
- Rifantiarni, Herlina Dhea. (2015). Tinjauan Atas Penerapan Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Pada Rsup Hasan Sadikin Bandung. *Phd Thesis. Universitas Widyatama.*
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 7(2), 111-130.*

- Subramanyam, K. R. dan John J. Wild. (2013). *Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10. Buku Dua. Yang Dialihbahasakan oleh Dewi Yanti*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (hal 204). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yushkov, A. (2015). Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience. *Russian Journal of Economics*, 1(4), 404-418.
- Yushkov, A. (2014). Fiscal Decentralization And Regional Economic Growth: The Case Of The Russian Federation. *Master Thesis: Department Of Economics, The University Of Bonn*.